KEBIJAKAN NASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

DIREKTUR PENJAMINAN MUTU
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
16 Maret 2016

Topics

1. Kebijakan Nasional SPM PT
2. Kebijakan Nasional SPMI dan AMI
3. Kebijakan Nasional SPME atau Akreditasi

POTRET AKREDITASI PT DAN PRODI

Jumlah dan Peringkat APS (Kepemilikan)

LEMBAGA	A	B	C	Total
PTN	1296 (27,39%) (64,99%)	2589 (54,72%) (31,97%)	846 (17,88%) (9,80%)	4731
PTS	496 (4,48%) (24,87%)	4235 (38,29%) (52,29%)	6329 (57,22%) (73,31%)	11060
KL	40 (10,34%) (2,01%)	252 (65,12%) (3,11%)	95 (24,55%) (1,10%)	387
PTAN	148 (13,05%) (7,42%)	668 (58,91%) (8,25%)	318 (28,04%) (3,68%)	1134
PTAS	14 (0,99%) (0,70%)	355 (25,11%) (4,38%)	1045 (73,90%) (12,10%)	1414
Total	1994 (100%)	8099 (100%)	8633 (100%)	18726

GRAFIK DATA AGREGAT HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI

NASIONAL

Borang Program Studi

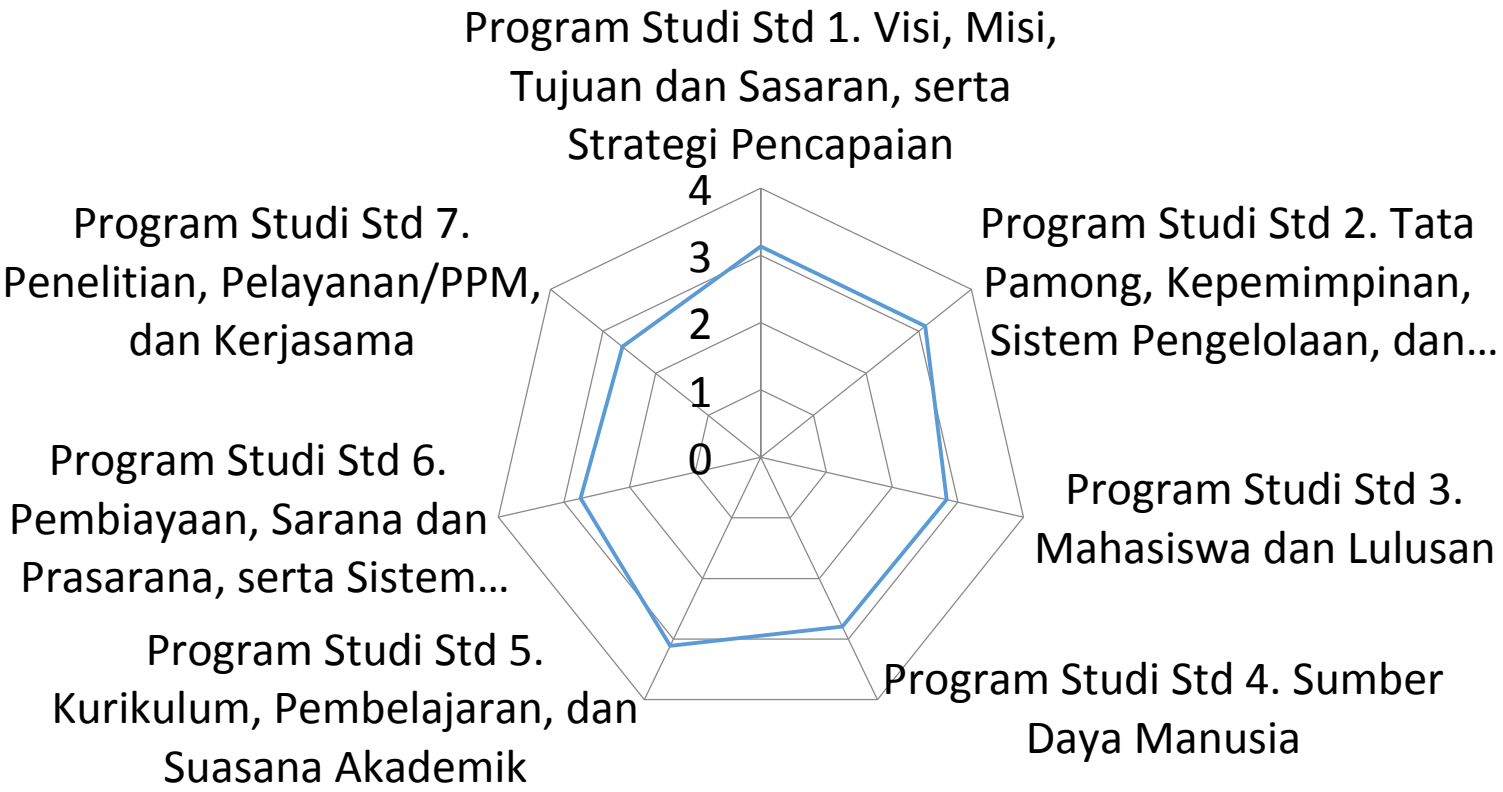

JAWA

Borang Program Studi

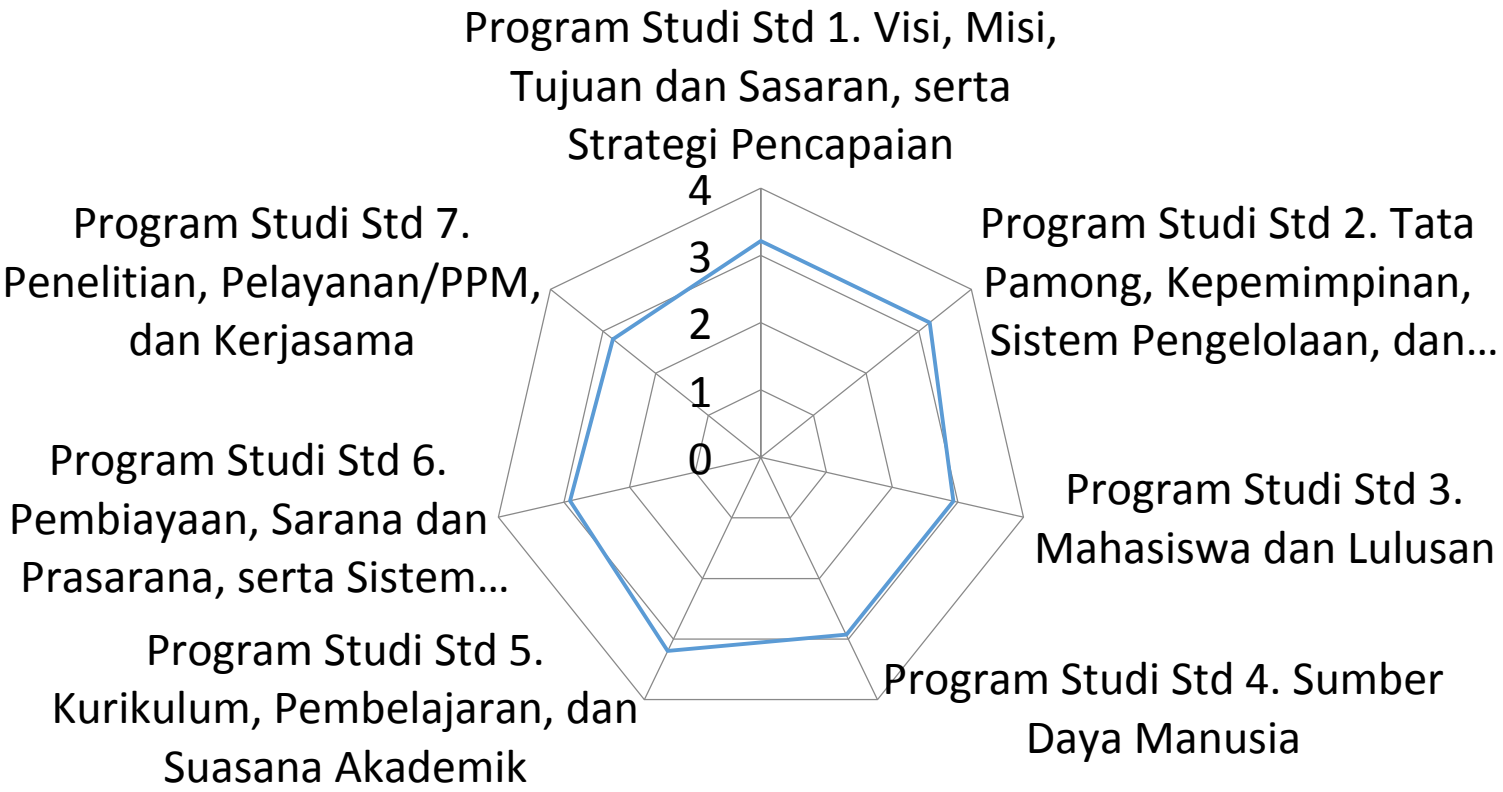

LUAR JAWA

Borang Program Studi

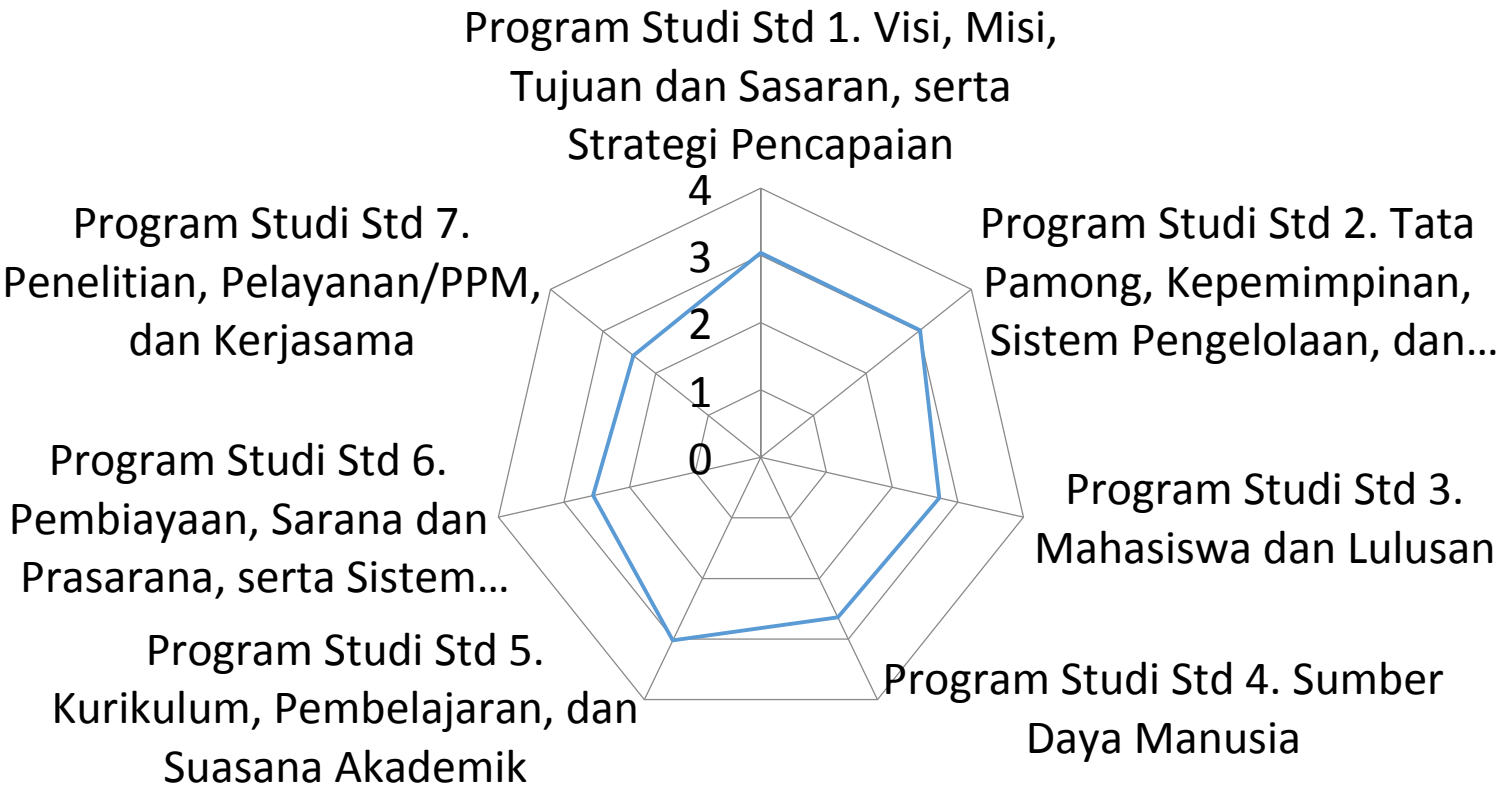

P T N

Borang Program Studi

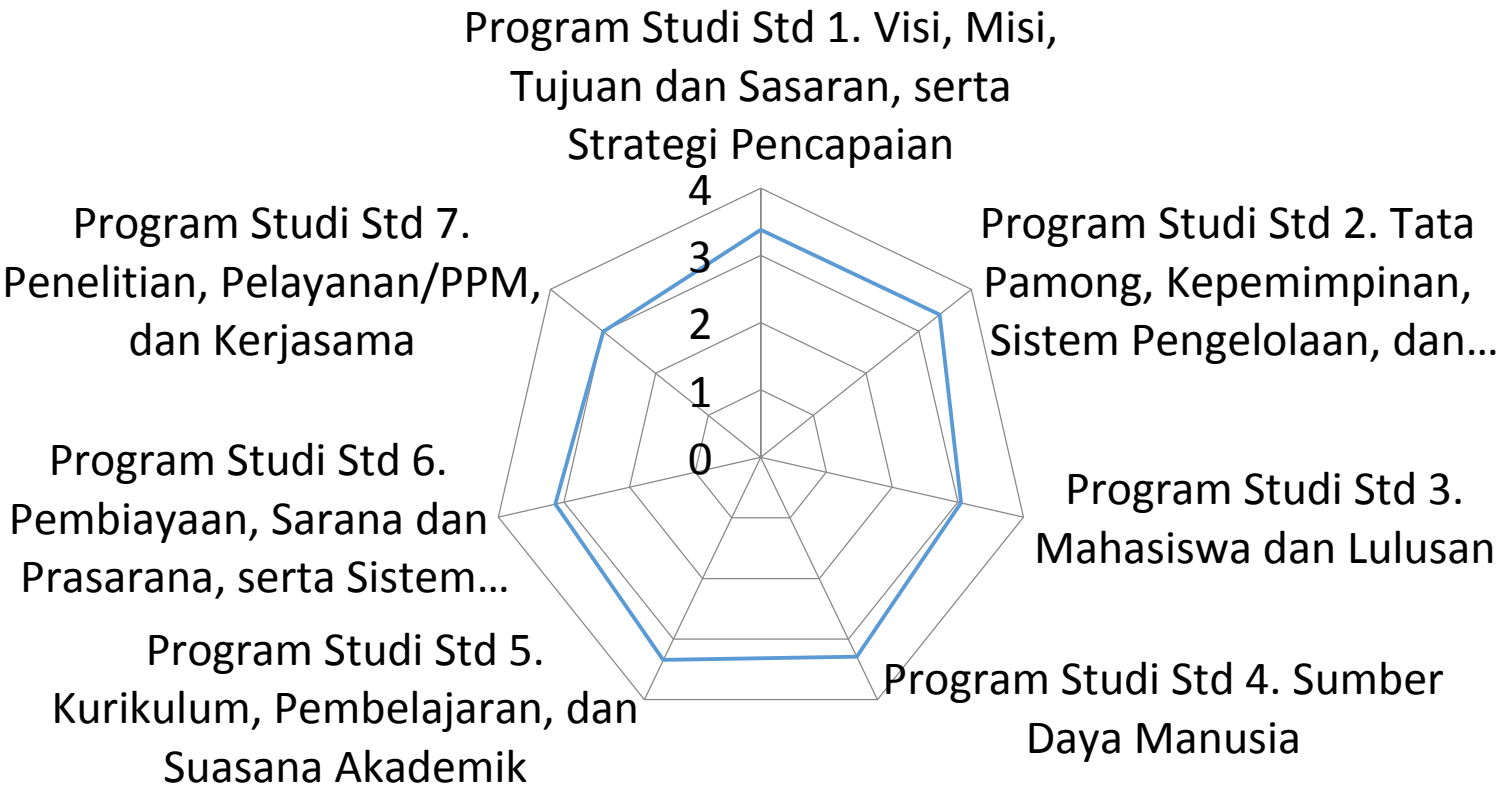

P T S

Borang Program Studi

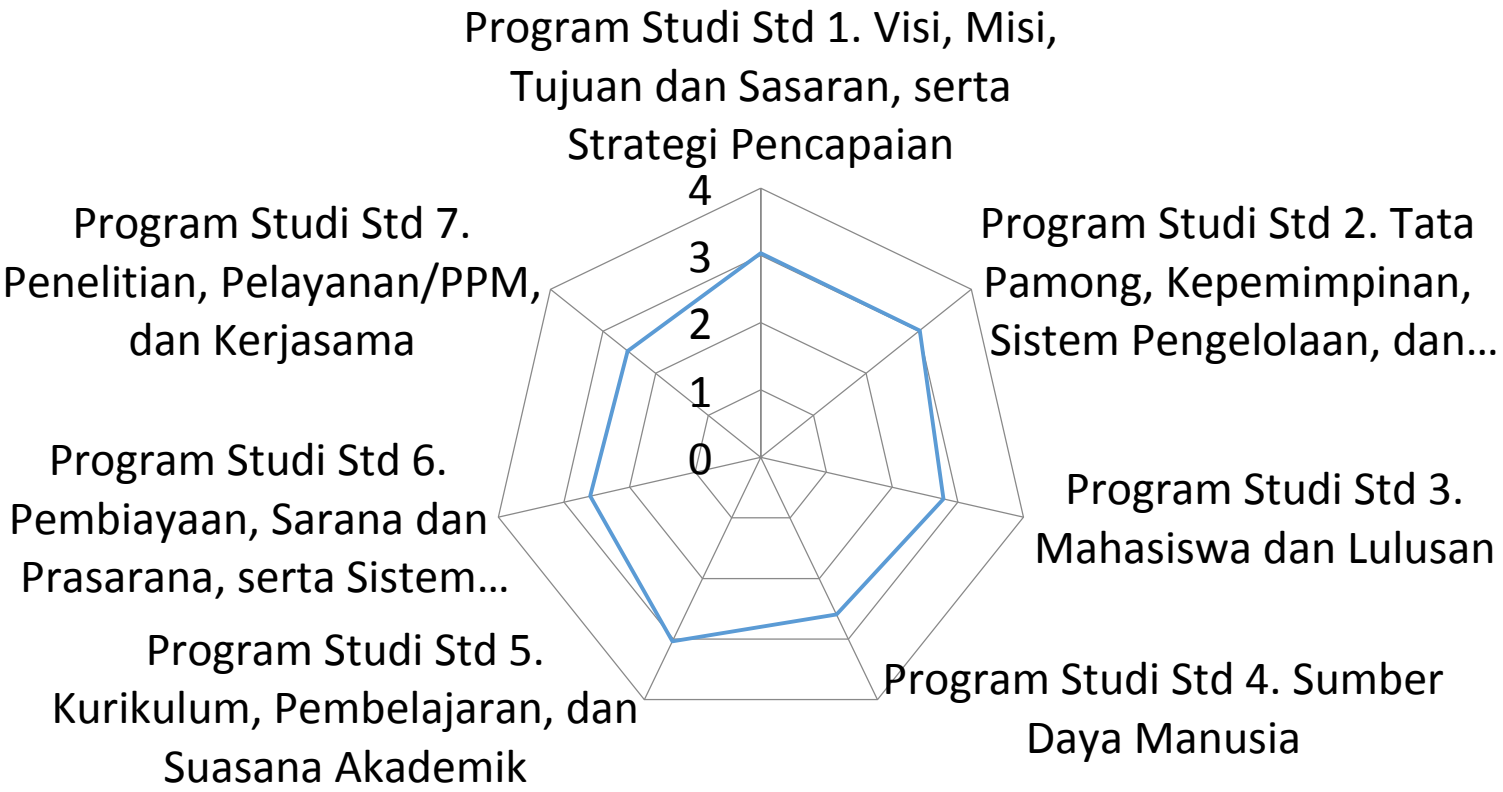

PERINGKAT A

Borang Program Studi

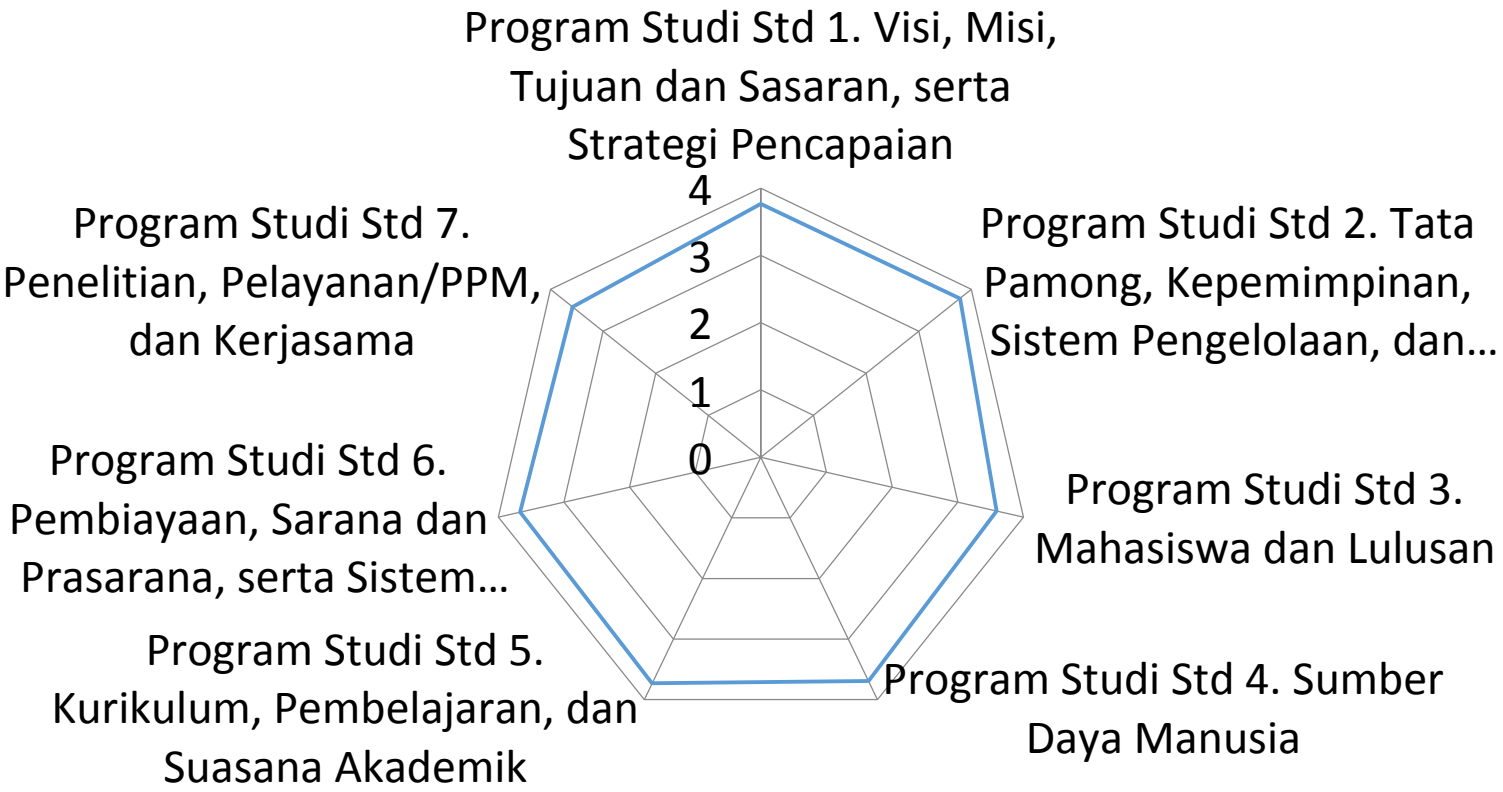

PERINGKAT C

Borang Program Studi

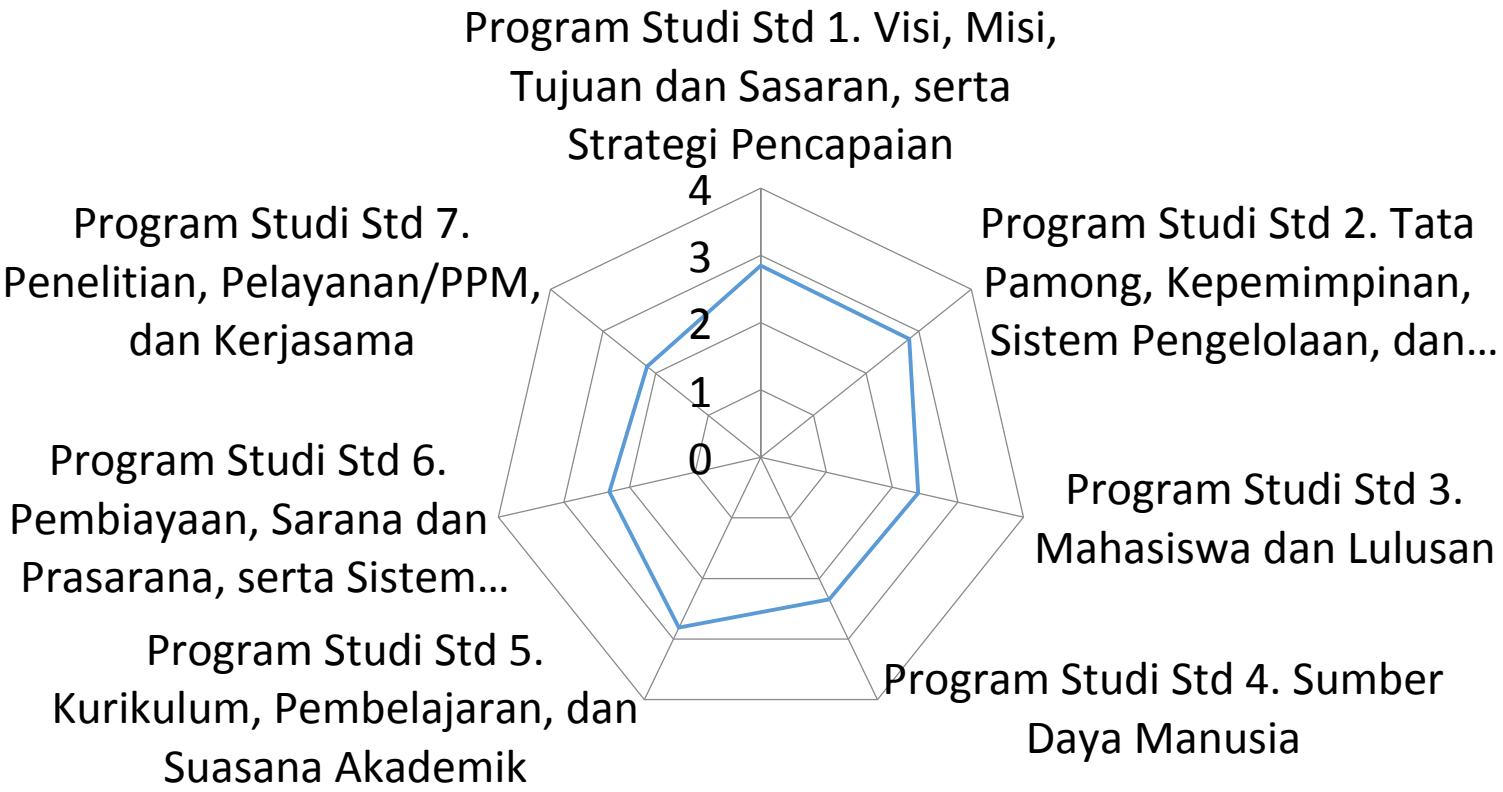

Milestones Peningkatan Mutu Prodi

2015

- Pemetaan Prodi
- Diseminasi SPMI
- Renstra
- Uji Kompetensi
- SN Dikti

2016

Diseminasi SPMI,SPME, PD Dikti
Bimtek
Pelatihan
Pendampingan
Klinik online
Master Plan
Permen 50 dan 87
Nomenklatur dan Penataan gelar

2017

Diseminasi SPMI,SPME, PD Dikti
Bimtek
Pelatihan
Pendampingan
Klinik online
Penguatan Kopertis
Program Asuh 2 arah

2018-2020

1 Kebijakan Nasional SPM PT

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- **Pasal 7 ayat (3) huruf c**
  Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:
  c. **peningkatan penjaminan mutu,** relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

- **BAB III: PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu	: **Sistem Penjaminan Mutu**
Bagian Kedua	: **Standar Pendidikan Tinggi**
Bagian Ketiga	: **Akreditasi**
Bagian Keempat	: **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**
Bagian Kelima	: **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

SPM Dikti (2)

Bagan SPMI berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti

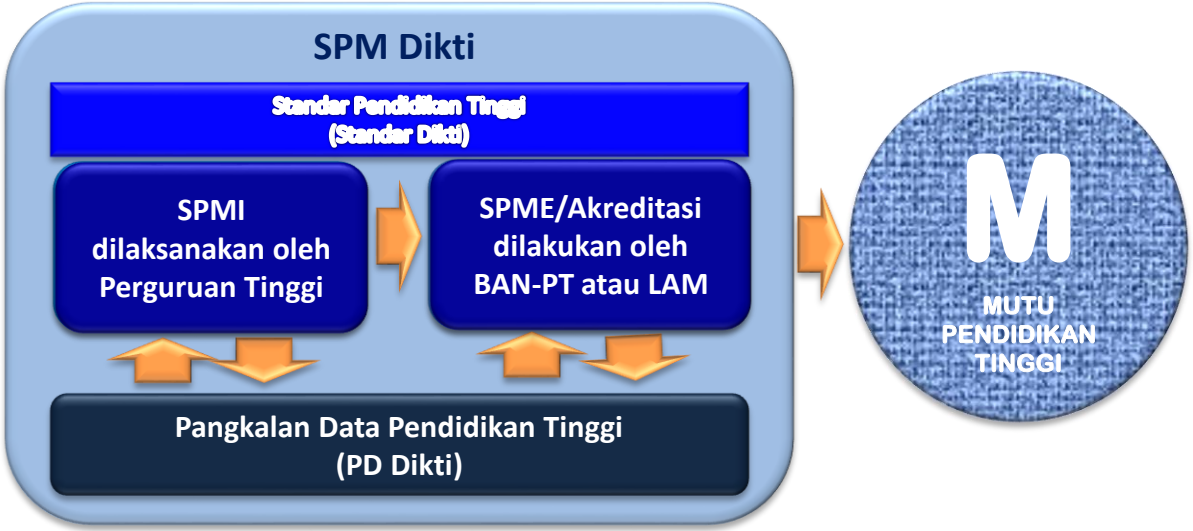

Keterangan

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:

a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);** dan
b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi**

SPM Dikti (4)

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Standar Dikti

- **SN Dikti** — Permenristek dikti No.44 Tahun 2015
- **Standar Dikti** — Ditetapkan Perguruan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan	+	Standar Nasional Penelitian	+	Standar Nasional PKM
Standar Kompetensi Lulusan		Standar Hasil Penelitian		Standar Hasil PKM
Standar Isi Pbelajaran		Standar Isi Penelitian		Standar Isi PKM
Standar Proses Pembelajaran		Standar Proses Penelitian		Standar Proses PKM
Standar Penilaian Pembelajaran		Standar Penilaian Penelitian		Standar Penilaian PKM
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Standar Peneliti		Standar Pelaksana PKM
Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran		Standar Sarpras Penelitian		Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan Pembelajaran		Standar Pengelolaan Penelitian		Standar Pengelolaan PKM
Standar Pembiayaan Pembelajaran		Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian		Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
Standar Bidang Akademik	dan	**Standar Bidang Non-Akademik**		
Standar....		Standar....		
Standar		Standar		
Dst		Dst		

- **Standar Dikti** (Melampaui SN Dikti) — Ditetapkan Perguruan Tinggi
- **SN Dikti** (Standar Minimal) — Permenristek-dikti No. 44 Tahun 2015

SPM Dikti (5)

Manajemen SPMI

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidkan Tinggi

Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan** standar Pendidikan Tinggi

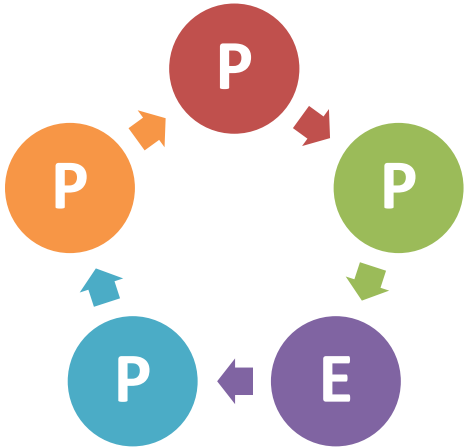

Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

SPM Dikti (6)

Kelembagaan dan Proses SPM Dikti

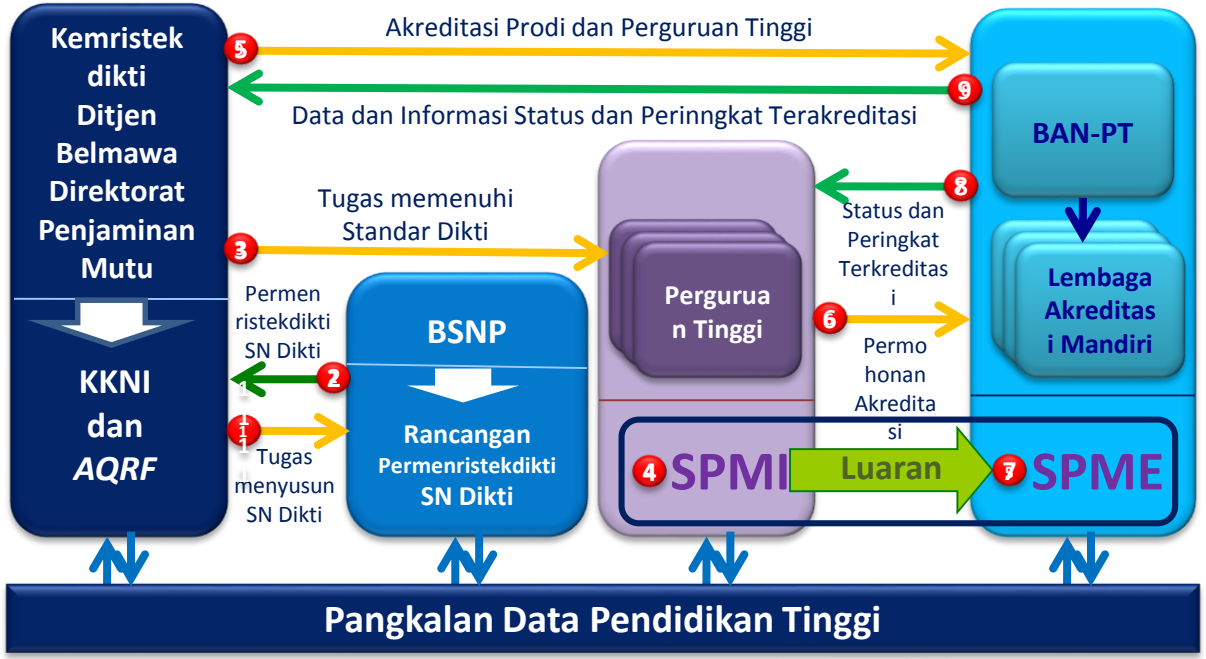

2 Kebijakan Nasional SPMI dan AMI

P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI

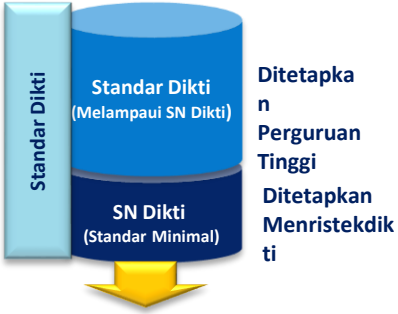

SN Dikti dapat 'dilampaui' sesuai dengan **Visi Perguruan Tinggi**

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang **harus 'melampaui'** SN Dikti ditentukan oleh **Visi Perguruan Tinggi**.

Pengertian '**melampaui**' atau **'dilampaui'**:

a. melebihi atau dilebihi secara '**kuantitatif**', dan/atau
b. melebihi atau dilebihi secara '**kualitatif**

SPMI (4) P **P**enetapan Standar Pendidikan Tinggi;

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)

- Standar Rekrutasi
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur & Cuti
- Standar Penghasilan & Penghargaan
- Standar Jamsos & Kesejahteraan
- Standar Pengembangan & Pembinaan
- Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Standar Disiplin
- Standar Perjalanan Dinas
- Standar Pengakhiran Hubungan Kerja

SPMI (6) P **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi;

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Standar Pendidkan Tinggi

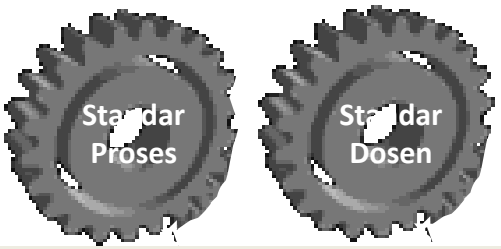

Mutu Pendidikan Tinggi diukur dari pemenuhan **setiap Standar Pendidikan Tinggi** sebagai agregat, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antar Standar Pendidikan Tinggi

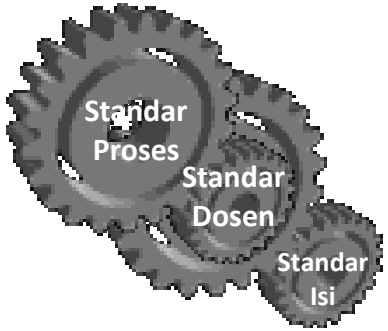

Mutu Pendidikan Tinggi **selain** diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula** diukur dari pemenuhan **interaksi antar standar Pendidikan Tinggi**, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi

P **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi;

Alternatif 1 Menjilid Dokumen/Buku SPMI

Misalnya terdapat **50 Standar** dalam SPMI suatu perguruan tinggi

Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Berisi 50 Standar Dikti

Berisi Manual untuk 50 Standar Dikti.
setiap manual berisi:

- **Manual penetapan satu Standar Dikti**
- **Manual pelaksanaan satu Standar Dikti**
- **Manual evaluasi pelaksanaan satu Standar Dikti**
- **Manual pengendalian pelaksanan satu Standar Dikti**
- **Manual peningkatan satu Standar Dikti**

Berisi satu atau lebih formulir untuk setiap Standar Dikti

P **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi;

Alternatif 2 Menjilid Dokumen/Buku SPMI (2)

Jika terdapat **50 Standar** di dalam sebuah perguruan tinggi, maka terdapat:

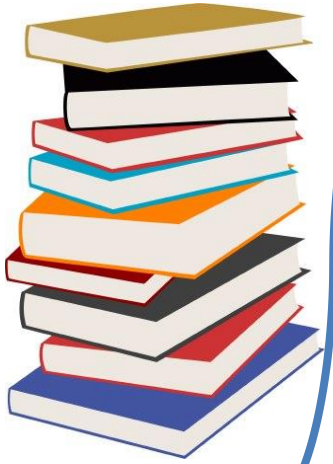

50 Buku Standar

Setiap Buku Standar Dikti berisi:
(Misalnya **Standar Kurikulum**)

Berisi:

- **Manual Penetapan Standar Kurikulum**
- **Manual Pelaksanaan Standar Kurikulum**
- **Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kurikulum**
- **Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kurikulum**
- **Manual Peningkatan Standar Kurikulum**

E **valuasi** Standar Pendidikan Tinggi;

- **Evaluasi Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti.
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
  a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.

P **Pengendalian** Standar Pendidikan Tinggi;

Pengendalian Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi **mempertahankan pencapaian** dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi **mempertahankan pelampauan** dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan **tindakan koreksi pelaksanan** Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dicapai, atau agar pelaksanaan Standar Dikti kembali pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	

P **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi.

Manajemen SPMI

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Peningkatan) akan menghasilkan ***kaizen*** atau ***continuous quality improvement*** mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

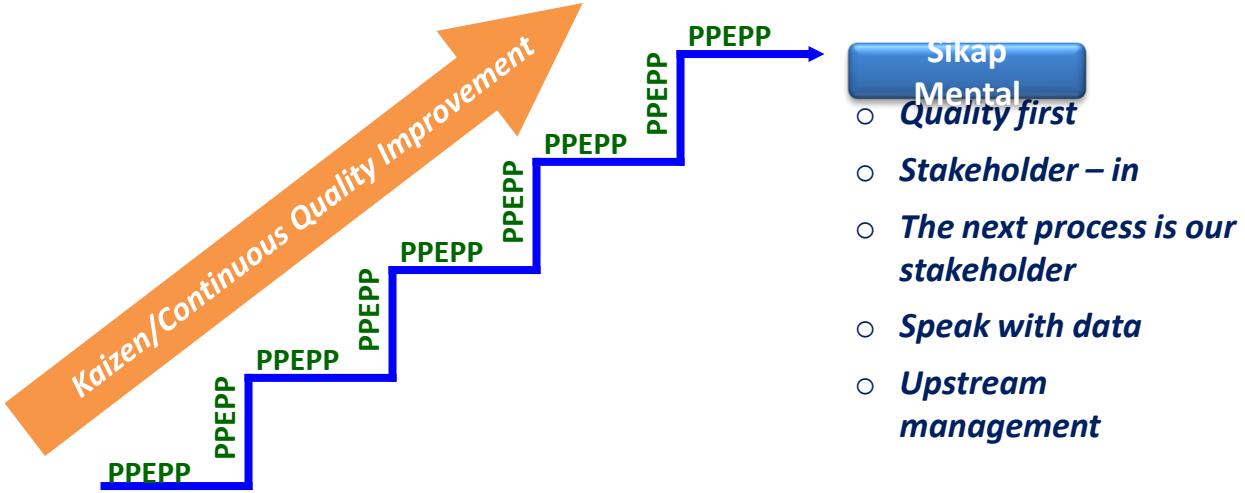

1. Evaluasi Pelaksanaan Standar dan Audit Internal (4)

1. Audit Internal adalah kegiatan yang independen, obyektif, terrencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti;
2. Audit Internal mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan;
3. Audit internal dilakukan oleh *peer group* terhadap unit atau institusi dan/atau program atau kegiatan, dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokan, dan memverifikasi.
4. Audit Internal dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.

3. Kebijakan Audit Internal Dalam Kerangka SPMI (4)

- **Unit dan/atau Personil Yang Menjadi Auditor Internal**
  Kantor/Lembaga khusus: perencanaan, penyusunan instrumen audit, melatih auditor, dsbnya.

  a. Para Auditor Internal: kualifikasi, seleksi, pelatihan, pengang-katan, penugasan, dsbya.

- **Periode dan frekuensi Audit Internal**

  tahunan; semesteran, atau tergantung permintaan; penjadwalan pelaksanaan audit internal.

3 Kebijakan Nasional SPME atau Akreditasi

Kebijakan Nasional Akreditasi (1)

Pasal 55 UU Dikti

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan **sistem akreditasi**.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**.

Kebijakan Nasional Akreditasi (2)

Pasal 55 UU Dikti

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta **dapat** berdasarkan kewilayahan.

Tujuan dan Prinsip SPME atau Akreditasi

- **Tujuan SPME atau Akreditasi**

  a. **menentukan kelayakan Program Studi** dan **Perguruan Tinggi** berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

  b. **menjamin mutu Program Studi** dan **Perguruan Tinggi** secara **eksternal** baik **bidang akademik** maupun **non akademik** untuk **melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat**.

- **Prinsip SPME atau Akreditasi**

  a. **independen**;
  b. **akurat**;
  c. **obyektif**;
  d. **transparan**;
  e. **akuntabel**.

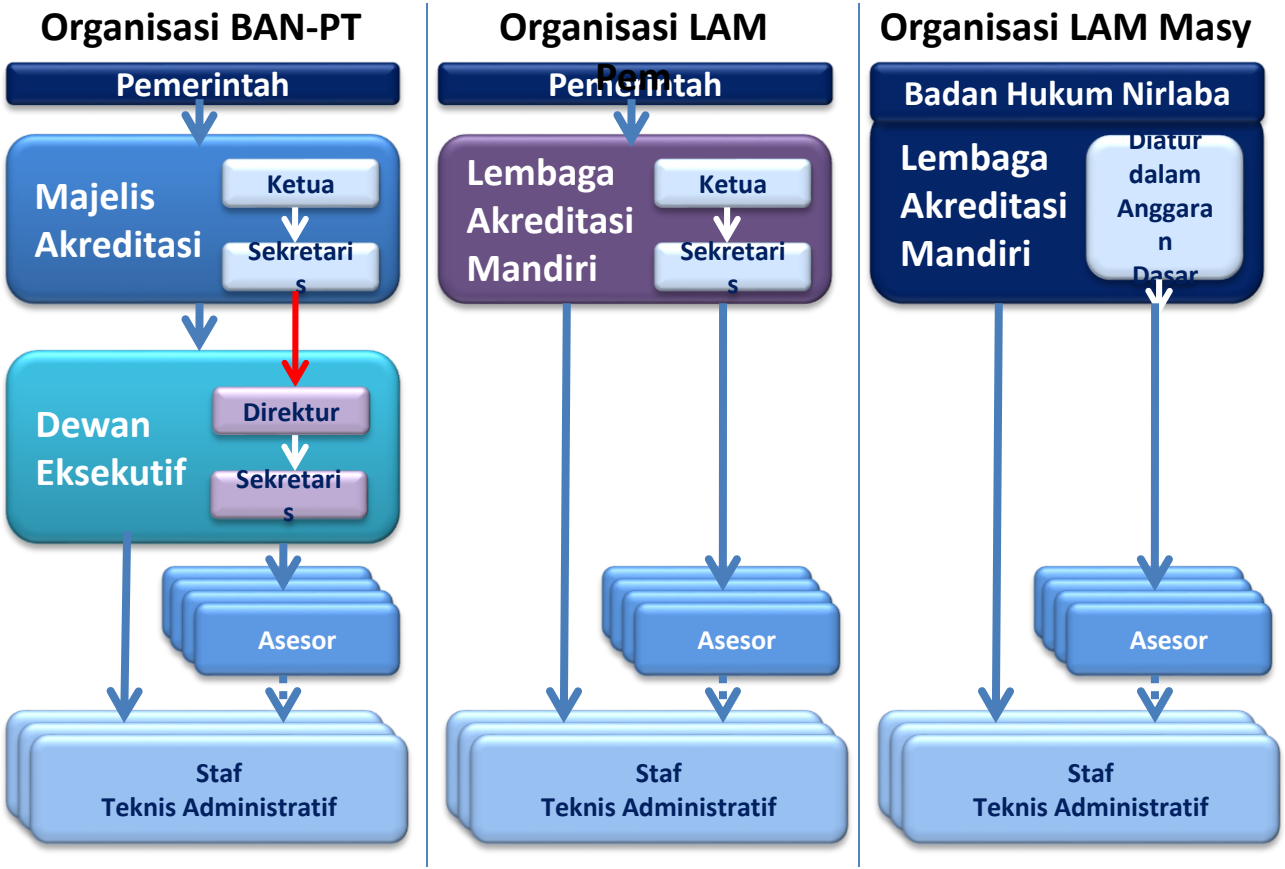
Organisasi BAN-PT
Pemerintah
Majelis Akreditasi
Ketua
Sekretaris
Dewan Eksekutif
Direktur
Sekretaris
Asesor
Staf Teknis Administratif
Organisasi LAM
Pemerintah
Lembaga Akreditasi Mandiri
Ketua
Sekretaris
Asesor
Staf Teknis Administratif
Organisasi LAM Masy
Badan Hukum Nirlaba
Lembaga Akreditasi Mandiri
Diatur dalam Anggaran Dasar
Asesor
Staf Teknis Administratif

Tahap Pemantauan Status dan Peringkat Akreditasi

- **Tahap Pemantauan Status dan Peringkat Terakreditasi** meliputi langkah:
  a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan **pemantauan terhadap status dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi** yang telah ditetapkan, **berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan/atau fakta hasil asesmen lapangan**;
  b. Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi **dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir**, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi **terbukti tidak lagi memenuhi syarat status dan peringkat terakreditasi tersebut**.

Akreditasi Berbeda dengan Rangking

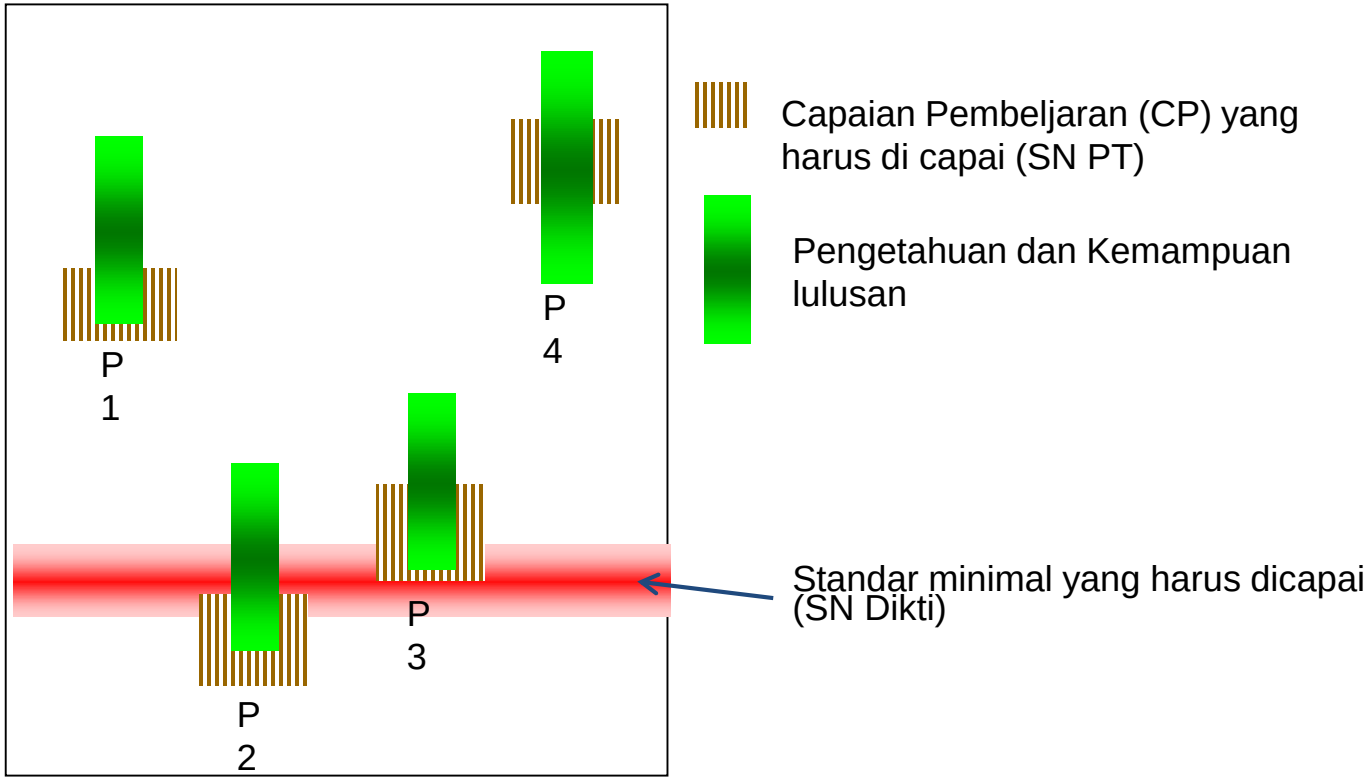

.

Tahap Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi

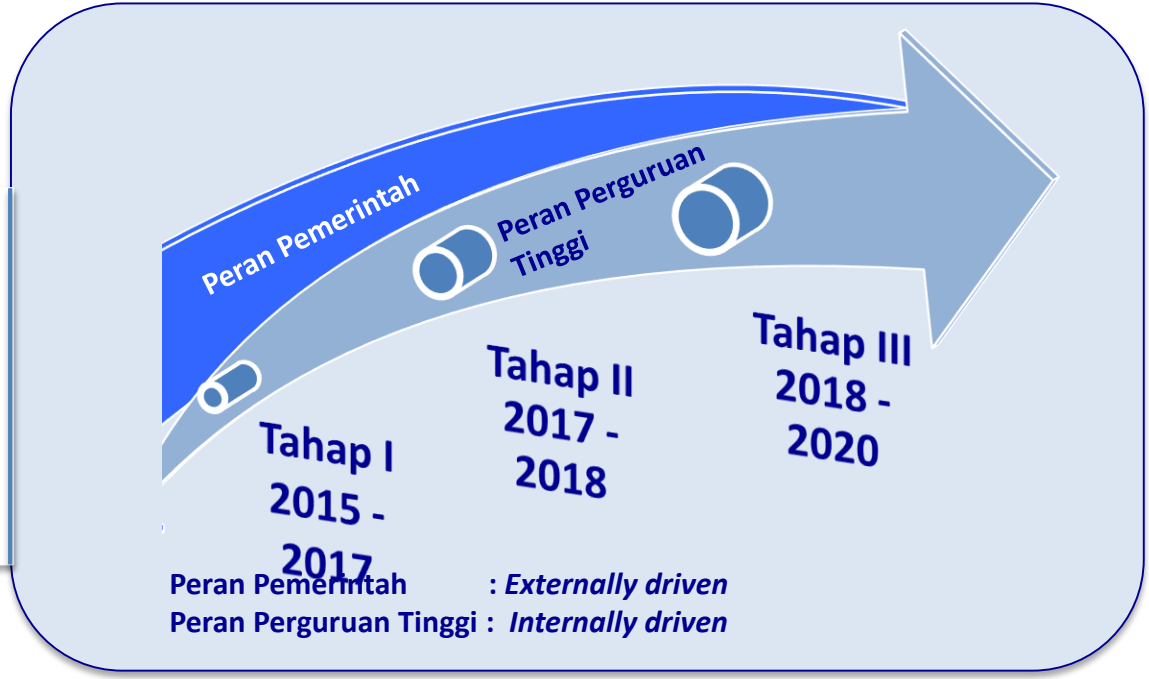

TERIMA KASIH